

## **Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Keluarga Harapan di Kabupaten Klaten (Studi Gender Model Sara Hlupekile Longwe)**

**Anisa Desianti Ramadhani, Sri Yuliani**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret  
Email : [desiantianisa118@student.uns.ac.id](mailto:desiantianisa118@student.uns.ac.id)

### **Abstrak**

Kemiskinan merupakan isu global dan masuk dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs). Menurut Whitehead (Kemenpppa. 2016) melakukan pendataan bahwa lebih dari setengah masyarakat miskin di negara berkembang adalah perempuan. Kabupaten Klaten merupakan salah satu Kabupaten dengan Indeks Pembangunan Gender yang terus mengalami peningkatan pada tahun 2018-2020. Namun Berdasarkan data pengeluaran perkapita Kabupaten Klaten menunjukkan pengeluaran per kapita perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki di Kabupaten Klaten, hal tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan gender dalam tingkat kesejahteraan ekonomi perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki di Kabupaten Klaten. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan sekaligus upaya yang mewadahi pemberdayaan perempuan yaitu dengan menjalankan Program Keluarga Harapan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kerangka pemberdayaan perempuan Sara Hlupekile Longwe: yakni: kesejahteraan, akses, kesadaran, partisipasi, dan kontrol. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan studi dokumentasi. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun pemberdayaan perempuan pada Program Keluarga Harapan telah mampu menambah tingkat kesejahteraan, akses, penyadaran dan partisipasi namun belum dapat mencapai pada tingkat kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam Program Keluarga Harapan belum sepenuhnya berdaya. Keadaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah budaya patriarki yang masih mempengaruhi kehidupan masyarakat.

**Kata kunci: Pemberdayaan Perempuan; Studi Gender Model Sara Hlupekile Longwe; Program Keluarga Harapan**

### **Abstract**

Poverty is a global issue and is included in the agenda of the Sustainable Development Goals (SDGs). According to Whitehead (Kemenpppa. 2016) conducted a data collection that more than half of the poor in developing countries are women. Klaten Regency is one of the regencies with a Gender Development Index which continues to increase in 2018-2020. However, based on the per capita expenditure data of Klaten Regency, it shows that women's per capita expenditure is lower than that of men in Klaten Regency, this shows that there is still a gender gap in the level of women's economic welfare which is lower than that of men in Klaten Regency. tackling poverty as well as efforts to accommodate women's empowerment, namely by running the Family Hope Program. The theory used in this study is Sara Hlupekile Longwe's women's empowerment framework theory: namely: welfare, access, awareness, participation, and control. In this study, the method used is descriptive qualitative research method where the data collection techniques used are interview techniques and documentation studies. The field findings show that although the

empowerment of women in the Family Hope Program has been able to increase the level of welfare, access, awareness and participation, it has not been able to reach the level of control. This shows that the empowerment of women in the Family Hope Program has not been fully empowered. This situation is influenced by several factors, one of which is patriarchal culture which still affects people's lives.

**Keywords: Women's Empowerment; Sara Hlupekile Longwe's Gender Study; Family Hope Program**

### **Pendahuluan**

Kemiskinan merupakan isu global dan masuk dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs). Berdasarkan pendapat dari Darwin (Prayitna., et al 2018) situasi kemiskinan dapat terjadi kepada siapa saja baik laki-laki maupun perempuan. Dalam perspektif gender bukan berarti mengecilkan kemiskinan yang dialami laki-laki kemiskinan yang dialami perempuan bersifat lebih spesifik (Prayitna., et al 2018). Menurut Whitehead (Kemenpppa. 2016) melakukan pendataan bahwa lebih dari setengah masyarakat miskin di negara berkembang adalah perempuan. Hal tersebut juga sesuai data dari perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa dari 1,3 miliar warga dunia yang masuk kategori miskin, 70% nya adalah kaum perempuan.

Salah satu daerah yang dengan sigap merespon kondisi tersebut yaitu Kabupaten Klaten. Hal ini dibuktikan dengan berita dari Fokusklaten.net menyebutkan bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Klaten mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sendiri adalah penghargaan yang penilaiannya berdasarkan upaya dalam mewujudkan atau mencapai pemberdayaan terhadap perempuan, kesetaraan terhadap laki-laki dan perempuan, pemenuhan kebutuhan anak dan perlindungan terhadap anak yang diberikan untuk lembaga atau pemerintah daerah yang telah mewujudkan hal-hal tersebut. Selain itu Kabupaten Klaten pada tahun 2020 merupakan kabupaten dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) telah sukses memperoleh sebesar 96,17% yang mampu mengungguli IPG Provinsi Jawa Tengah yang hanya mencapai 92,18% serta dapat melebihi IPG nasional yang baru mencapai 91,06%. IPG di Kabupaten Klaten juga terus mengalami peningkatan tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.**

#### **Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2018-2020 Kabupaten Klaten**

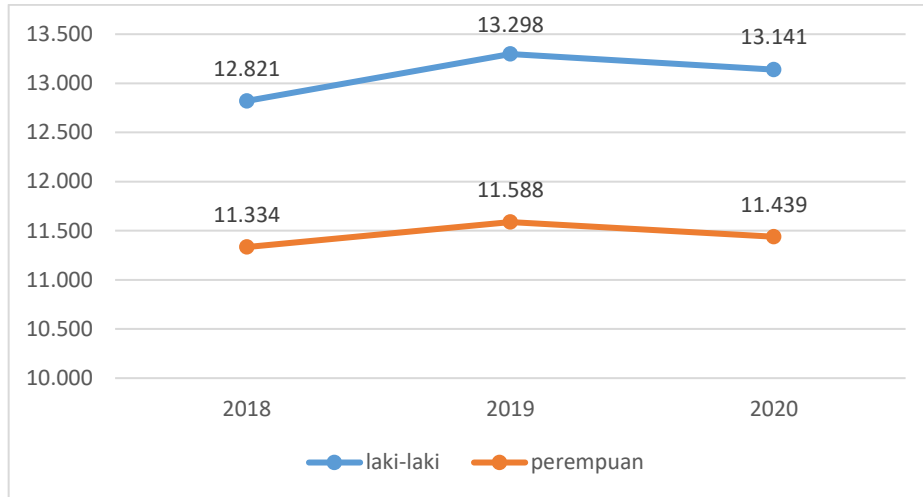
INDIKATOR	TAHUN		
	2018	2019	2020
IPG	96,00%	96,04%	96,17%

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Namun jika dilihat dari Perkembangan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (juta rupiah/ orang/tahun) menurut jenis kelamin pada tahun 2018-2020 yang

merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur hasil pembangunan manusia berbasis gender (IPG), menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita perempuan lebih rendah dibanding dengan laki-laki di Kabupaten Klaten. yaitu sebagai berikut:

**Gambar 1.**  
**Perkembangan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan menurut jenis kelamin tahun 2010-2020 (juta rupiah/ orang/tahun) Kabupaten Klaten.**



Berdasarkan data di atas mengungkapkan bahwa pengeluaran per kapita perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki di Kabupaten Klaten, hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan gender dalam tingkat kesejahteraan ekonomi perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki di Kabupaten Klaten. Kemiskinan pada perempuan seringkali disebabkan karena tidak memperoleh akses terhadap sumber daya yang krusial, yaitu seperti kredit, hak waris dan tanah, kondisi nutrisi dan kesehatan yang tidak diperhatikan, tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang tidak diakui secara ekonomi, dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di masyarakat dan dirumah sangat minimal. Maka dari itu kemiskinan perempuan yang bersifat spesifik tersebut memerlukan penanganan yang bersifat khusus juga. Maka dari itu perlu adanya proses pemberdayaan perempuan agar memiliki kondisi hidup lebih baik.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Hubeis pemberdayaan perempuan merupakan cara membangun bangsa melalui perempuan dengan upaya peningkatan peran dan kemandirian, begitu pula dengan kualitas kapasitas dan kemandirian kelompok perempuan (Saugi Wildan., Sumarno. 2015). Salah satu cara pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan sekaligus upaya yang mewadahi pemberdayaan perempuan yaitu dengan menjalankan Program Keluarga Harapan. Pemerintah Indonesia menggulirkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang

ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Adanya Program keluarga harapan (PKH) diharapkan mampu memberikan peran serta dalam mempercepat tujuan pembangunan dan pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs). PKH memiliki lima elemen untuk mendukung penuntasan masalah kelaparan dan penurunan masyarakat miskin, tercapainya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tercapainya pendidikan dasar, penurunan angka bayi dan balita yang meninggal serta penurunan angka ibu yang meninggal dalam proses persalinan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik meneliti Program Keluarga Harapan dengan menggunakan alat analisis gender Model Sara Hlupekile Longwe. Hal ini disebabkan dengan menggunakan alat analisis gender Model Sara Hlupekile Longwe dapat melihat responsivitas gender dalam Program Keluarga Harapan sehingga dapat diketahui seberapa jauh tingkat keberdayaan perempuan peserta Program Keluarga Harapan. Maka dari itu penelitian ini penting untuk dilakukan untuk melihat tingkat pemberdayaan perempuan melalui Program Keluarga Harapan di Kabupaten Klaten sebagai program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan.

Untuk melihat tingkat pemberdayaan perempuan melalui Program Keluarga Harapan pada penelitian ini akan menggunakan dimensi kerangka pemberdayaan perempuan Sara Hlupekile Longwe, Dalam kerangka pemberdayaan perempuan Sara Hlupekile Longwe terdiri dari dua alat pemberdayaan perempuan yaitu tingkat kesetaraan (*level of equality*) dan tingkat pengenalan/responsivitas terhadap isu-isu perempuan. Pada alat pemberdayaan perempuan pertama yaitu tingkat kesetaraan (*Level of equality*) terdiri dari dimensi-dimensi sebagai berikut: kesejahteraan, akses, kesadaran, partisipasi, dan kontrol. Sedangkan pada alat pemberdayaan perempuan kedua yaitu tingkat Pengenalan /responsivitas terhadap isu-isu perempuan mengidentifikasi dalam tiga tingkatan yaitu: negatif, netral dan positif (March,C., et al 1999).

### **Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menjelaskan mengenai pemberdayaan perempuan melalui program keluarga harapan di Kabupaten Klaten. Pemilihan lokasi yaitu di Kabupaten Klaten dikarenakan pada tahun 2021 Kabupaten Klaten mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Selain itu IPG di kabupaten Klaten juga terus mengalami peningkatan pada tahun 2018-2020. Namun jika dilihat dari Perkembangan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (juta rupiah/ orang/tahun) menurut jenis kelamin pada tahun 2018-2020 yang merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur hasil pembangunan manusia berbasis gender (IPG), menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita perempuan lebih rendah dibanding

dengan laki-laki di Kabupaten Klaten. Hal tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan gender di Kabupaten Klaten.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan *purposive sampling* dan *snowball*, dalam hal ini informan dipilih dengan menetapkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut yaitu informan yang dipilih yaitu orang yang terlibat langsung dalam program keluarga harapan di Kabupaten Klaten. Sedangkan penggunaan metode *snowball* sampling dalam penelitian ini yaitu yang pertama menemui Ketua Program Keluarga Harapan Kabupaten Klaten sebagai informan kunci untuk mengenalkan informan selanjutnya yaitu pendamping Program Keluarga Harapan. Selanjutnya dari setiap pendamping mengenalkan 1-2 perempuan peserta Program Keluarga Harapan untuk dijadikan informan. Kemudian perempuan peserta PKH mengenalkan kepada suaminya.

Data primer dalam penelitian ini yaitu diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan informan sebagai berikut: perempuan yang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH, Suami perempuan peserta PKH, Ketua Program Keluarga Harapan Kabupaten Klaten dan Pendamping Program Keluarga Harapan Kabupaten Klaten. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa gambar mengenai produk KUBE, gambar proses verifikasi pendamping PKH, gambar pembuatan produk KUBE PKH, gambar kegiatan P2K2, gambar modul buku pintar pengasuhan dan pendidikan anak, Dana Alokasi bantuan PKH Kabupaten Klaten, dan Jumlah nominal bantuan PKH.

Dalam pengujian validitas data, menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara yang telah didapatkan dari informan yang berbeda. Kemudian, dalam proses analisis data menggunakan model analisis interaktif oleh Miles dan Huberman (1984), yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

### **Hasil dan pembahasan**

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program untuk mengatasi masalah kemiskinan sekaligus upaya yang mawadahi pemberdayaan perempuan. Dilaksanakannya Program Keluarga Harapan agar perempuan mendapatkan akses yang lebih baik dalam menggunakan layanan kesehatan, pendidikan, sosial, kebutuhan makanan dan gizi sehingga dapat menghilangkan ketimpangan sosial, ketidakmampuan, serta keterasingan sosial yang sering melekat terhadap masyarakat miskin terutama kelompok perempuan. Keberdayaan perempuan pada program ini bisa dilihat dari kerangka analisis Sara Hlupekile Longwe atau yang lebih dikenal dengan kerangka pemberdayaan perempuan. Adapun kriteria yang digunakan dalam analisis program ini yaitu sebagai berikut:

#### **1. Tingkat Kesejahteraan Peserta Program Keluarga Harapan**

Tingkat kesejahteraan merupakan salah satu aspek yang penting dalam

pemberdayaan perempuan. Pada tingkat ini digunakan untuk melihat sejauh mana program keluarga harapan memberikan manfaat bagi perempuan peserta PKH. Tingkat kesejahteraan dalam penelitian ini merujuk pada kesejahteraan secara material dan kesejahteraan yang berkaitan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

Program keluarga harapan di Kabupaten Klaten pada tahun 2021 telah menyalurkan bantuan sebesar Rp 165.202.225.000 kepada 61.089 peserta PKH. Bantuan ini diterima oleh peserta PKH dalam 4 tahapan selama satu tahun. Berikut tabel alokasi bantuan PKH Kabupaten Klaten:

**Tabel 2.**

**Jumlah Alokasi Bantuan PKH Kabupaten Klaten Tahun 2013-2021**

Tahun	Jumlah Penerima	Alokasi Dana PKH
2013	25.878	Rp 15,778,025,000
2014	25.640	Rp 37,749,829,000
2015	24.378	Rp 43,788,497,500
2016	24.377	Rp 50,034,057,661
2017	41.507	Rp 78,425,250,000
2018	62.481	Rp 110,391,589,100
2019	58.395	Rp 193,818,450,000
2020	60.154	Rp 156,905,336,000
2021	61.089	Rp 165,202,225,000

*Sumber: UPPKH Kabupaten Klaten*

Sedangkan besaran bantuan terdapat perubahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Pada tahun 2021, besaran bantuan peserta PKH mendapatkan jumlah nominal bantuan yang berbeda-beda berdasarkan jumlah anggota keluarga yang mendapatkan bantuan serta komponen yang dimiliki. Berikut komponen nominal bantuan PKH tahun 2021:

**Tabel 3.**

**Komponen Nominal Bantuan PKH Tahun 2021**

Komponen	Bantuan dalam setahun	Bantuan pertahap
Ibu Hamil	Rp 3.000.000	Rp 750.000
Anak Usia Dini	Rp 3.000.000	Rp 750.000
SD	Rp 900.000	Rp 225.000
SMP	Rp 1.500.000	Rp 375.000
SMA	Rp 2.000.000	Rp 500.000
Lansia	Rp 2.400.000	Rp 600.000
Disabilitas Berat	Rp 2.400.000	Rp 600.000

*Sumber: UPPKH Kabupaten Klaten*

Dengan adanya perbedaan komponen anggota keluarga peserta PKH, maka besar bantuan yang diterima setiap peserta akan bervariasi. Jika dilihat dari

aspek kesejahteraan, peserta PKH merasakan adanya perbedaan setelah adanya bantuan PKH. Mereka menjadi sangat terbantu dalam pemenuhan kebutuhan hidup terutama untuk biaya-biaya sekolah dan pemenuhan gizi anak mereka. Dalam hal kesehatan dan pangan, bantuan ini bermanfaat dengan terbantunya mereka dalam membeli makanan bergizi bagi anak dan perlengkapan balita. Sedangkan dalam hal pendidikan, para ibu peserta PKH mengatakan bahwa mereka terbantu dalam hal membayar SPP dan penyediaan peralatan sekolah seperti seragam sekolah, buku LKS, sepatu. Selain itu dalam PKH terdapat sebut kegiatan yang bernama Kelompok usaha bersama atau yang lebih sering dikenal dengan nama KUBE. KUBE PKH yaitu bantuan yang diberikan untuk mendorong peserta PKH memiliki usaha produktif. KUBE PKH merupakan salah satu cara memberdayakan keluarga PKH agar dapat mandiri serta dapat memenuhi kehidupan secara terus-menerus sekalipun lepas dari program keluarga harapan. Tujuan dari adanya kelompok usaha bersama PKH yaitu sebagai berikut (Kementerian Sosial: 2014):

- a) Tercapainya sinergi yang baik program keluarga harapan dan pemberdayaan dengan KUBE untuk meningkatkan penghasilan peserta KUBE PKH sehingga dapat hidup dengan layak.
- b) Tercapainya keadaan yang dapat menjamin anggota peserta KUBE PKH untuk keberlanjutan hidup baik secara sosial maupun ekonomi.
- c) Tercapainya kemandirian dalam mengelola usaha ekonomi produktif yang dimiliki anggota peserta KUBE PKH
- d) Meningkatnya penghasilan anggota KUBE PKH karena dampak berkembangnya usaha ekonomi produktif.
- e) Meningkatnya kondisi kehidupan dan kesejahteraan sosial anggota KUBE PKH.

Proses implementasi KUBE PKH dilaksanakan dengan memberikan modal usaha, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, pendampingan serta dibimbing untuk meningkatkan motivasi dalam mengelola usaha. Setiap kelompok KUBE PKH mendapatkan pendampingan dengan adanya pendampingan usaha yang dikelola dapat berkembang dengan baik dan kesejahteraan anggotanya akan meningkat. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan KUBE PKH yaitu dengan adanya pendamping. Peran pendamping disini sangat besar seperti fasilitator, narasumber dan penggerak bagi pemberdayaan keluarga miskin.

Selain itu produk dari KUBE di Kabupaten Klaten ini sungguh beragam mulai dari makanan dan minuman seperti rempeyek, telur asin, bawang goreng minuman jahe-jahe, susu dll. Selain itu juga ada aksesoris seperti tas, jepit rambut dan bros. Dan terdapat juga tanaman hidroponik.

**Gambar 2.**  
**Produk KUBE PKH Kabupaten Klaten**



Adanya Kelompok usaha bersama (KUBE) PKH yang memberikan pelatihan keterampilan dan modal usaha telah mampu dimanfaatkan peserta PKH untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan keterampilan dan bantuan modal perempuan peserta PKH telah memulai membuka usaha. Hasil usaha yang dijalankan telah mampu menambah pendapatan perempuan, dengan begitu kesejahteraan perempuan mulai meningkat.

Dibandingkan sebelum adanya PKH, dengan bantuan yang mereka terima ini dapat perubahan dan peningkatan kesejahteraan perempuan dapat dilihat dari penggunaan uang bantuan PKH yang digunakan untuk membeli kebutuhan gizi ibu dan anak, selain itu dengan adanya KUBE PKH juga menambah penghasilan perempuan dengan begitu kesejahteraan perempuan lebih meningkat. Meskipun tingkat kesejahteraan merupakan tahap awal dalam memberdayakan perempuan namun tanpa keamanan materi dasar ini sulit bagi perempuan untuk melangkah naik pada tingkat pemberdayaan berikutnya.

## **2. Tingkat Akses Peserta Program Keluarga Harapan**

Tingkat akses dalam penelitian ini adalah kemampuan dan kesempatan dalam menggunakan sumber daya. Salah satu tujuan PKH adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH. Dalam penelitian ini, tingkat akses dilihat dari kesempatan warga miskin dalam mengakses pendidikan dan kesehatan khususnya bagi anak-anak peserta PKH.

Akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga sangat



miskin inilah yang menjadi inti dari program PKH atau bantuan tunai bersyarat. Untuk itu penelitian ini akan melihat capaian PKH di Kabupaten Klaten apakah telah mampu meningkatkan kehadiran anak-anak dan ibu hal pada fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Adanya bantuan PKH ini para peserta PKH menjadi lebih termotivasi untuk memanfaatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan motivasi kehadiran pada pelayanan posyandu dan sekolah tersebut di antaranya disebabkan adanya sanksi. Jika mereka tidak hadir, dipotong bantuannya bahkan bisa membuat peserta diberhentikan dari PKH. Sanksi yang diberikan merupakan ciri dari program bantuan tunai langsung, hal tersebut merupakan salah satu cara agar target grupnya dipaksa melaksanakan kewajiban yang disyaratkan. Pada PKH, syarat yang diberikan yaitu mewajibkan peserta PKH untuk hadir pada layanan kesehatan dan pendidikan.

Kehadiran anak-anak peserta PKH pada layanan pendidikan dan kesehatan dicatat dalam form verifikasi komitmen setiap bulan. Tujuan dari verifikasi komitmen yaitu memastikan semua peserta PKH hadir dan mengakses layanan pendidikan serta kesehatan secara rutin. Pelaksanaan verifikasi komitmen dilaksanakan langsung oleh pendamping PKH dengan mendatangi layanan pendidikan dan kesehatan pada kurun waktu tertentu kemudian dicatat kehadiran seluruh peserta PKH pada layanan tersebut dan dimasukkan kedalam aplikasi e-PKH. Setiap pendamping juga menerbitkan sebuah kartu kehadiran untuk peserta KPM PKH.

Mekanisme verifikasi kehadiran dan motivasi mendapatkan bantuan inilah yang membuat ibu-ibu hamil dan balita untuk hadir pada layanan kesehatan, dan anak usia sekolah pada layanan pendidikan. Dari hasil entri verifikasi komitmen menjadi salah satu dasar penyaluran, penangguhan dan penghentian bantuan. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmennya, maka besaran bantuan yang diterima akan di pending. Berikut gambar verifikasi yang dilakukan oleh pendamping PKH.

**Gambar 3.**  
**Verifikasi yang dilakukan oleh pendamping**  
**Program Keluarga Harapan**



Peran Pendamping dalam memberikan motivasi dan melakukan evaluasi terhadap kewajiban peserta untuk melaksanakan protokol kesehatan dasar inilah yang menjadi kunci keberhasilan pencapaian tujuan PKH. Meskipun ditemukan beberapa peserta yang tidak memenuhi komitmennya, pada akhirnya mereka menyadari bahwa kehadiran pada layanan kesehatan menjadi penting. Demikian juga dengan peran Pendamping dalam memberikan motivasi dan evaluasi kepada perempuan miskin peserta PKH untuk meningkatkan akses dasar pendidikan dan kesehatan. Hal inilah yang kemudian bisa kita ketahui mengapa PKH ditargetkan kepada perempuan.

### **3. Tingkat Kesadaran Peserta Program Keluarga Harapan**

Dimensi kesadaran kritis yang dimaksud adalah adanya kesadaran ideologis bahwa tidak ada perbedaan bagi perempuan ataupun laki-laki untuk memberdayakan diri mereka serta menolak adanya subordinasi terhadap perempuan.

Tingkat penyadaran pada penelitian ini juga melihat pada cakupan keyakinan bahwa pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan harus adil, tidak terdapat dominasi salah satu jenis kelamin. Keyakinan persamaan ini terletak pada landasan kesadaran gender dan memberikan landasan partisipasi kolektif antara laki-laki dan perempuan. Dasar dari kesadaran ini diawali dari pemahaman dan peka terhadap diskriminasi. Diskriminasi bahwa perempuan lebih rendah status sosialnya dibandingkan laki-laki.

Di Kabupaten Klaten, PKH telah melakukan mekanisme P2K2 (Peningkatan kemampuan Keluarga) atau FDS (*family development session*) sebagai upaya penyadaran kepada perempuan tentang adanya diskriminasi pada perempuan peserta PKH. Para Pendamping diberikan pelatihan tentang peningkatan kapasitas keluarga bagi peserta PKH dan diberikan tugas untuk melakukan pemberdayaan perempuan.

Metode yang digunakan oleh pendamping dalam melakukan penyampaian materi tentang manajemen keluarga atau dikenal dengan P2K2 ini kepada peserta PKH adalah melalui pertemuan kelompok rutin dan dilakukan pelatihan menggunakan metode role play, pemutaran film dan permainan tentang peningkatan kapasitas keluarga. Berikut gambar proses kegiatan P2K2 dengan beberapa metode.

**Gambar 4.**  
**Proses Kegiatan P2K2 Dengan Beberapa Metode**



Dalam kegiatan P2K2 terdapat proses penyadaran kepada pihak perempuan maupun laki –laki bahwa kewajiban dan tanggung jawab pada tugas-tugas domestik merupakan tugas dan kewajiban bersama. Upaya ini dilakukan untuk memunculkan kesadaran bersama antara laki-laki dan perempuan dalam manajemen rumah tangga.

Dalam pelaksanaan pemahaman kepada suami ini, pihak suami tidak langsung ikut dalam pertemuan P2K2 namun melalui istri yang mengikuti pertemuan P2K2 untuk menyampaikan materi mengenai kewajiban dan tanggung jawab pada tugas-tugas domestik kepada suami. Walaupun tidak mengikuti kegiatan P2K2 secara langsung namun dengan penjelasan yang diberikan oleh istri pihak suami juga menyadari bahwa tugas domestik merupakan tugas bersama. Selain itu dengan modul buku pengasuhan dan pendidikan anak yang diberikan PKH kepada keluarga peserta PKH, modul buku tersebut membuat suami juga belajar mengenai tugasnya di dalam rumah tangga.

**Gambar 5.**  
**Modul Buku Pintar Pengasuhan Dan Pendidikan Anak Program Keluarga Harapan**



Upaya memunculkan kesadaran terhadap laki-laki atau suami peserta PKH ini dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kesetaraan peran laki-laki dan

perempuan terutama berkaitan di ranah domestik. Dengan kesadaran terhadap laki-laki, misalnya terhadap pengasuhan anak, hal ini bisa mengurangi beban kerja perempuan yang selama ini melekat pada peran tradisional perempuan.

Dengan P2K2 ini setidaknya PKH telah memberikan kepekaan bahwa terdapat diskriminasi peran di dalam rumah tangga kepada perempuan dan laki-laki, seperti tentang pengasuhan anak. Ketika terdapat kesadaran untuk lebih peka terhadap perbedaan atau diskriminasi ini, beban perempuan menjadi berkurang dengan kesadaran bahwa pekerjaan-pekerjaan domestik juga menjadi tanggung jawab laki-laki.

#### **4. Tingkat Partisipasi Peserta Program Keluarga Harapan**

Dalam meningkatkan keberdayaan perempuan partisipasi sangatlah penting untuk meningkatkan kapasitas perempuan. Partisipasi peserta PKH terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah suatu proses sikap mental dimana peserta PKH ikut aktif menyumbang kreativitas dan inisiatifnya dalam usaha meningkatkan kualitas hidupnya melalui Program Keluarga Harapan. Pada tingkat partisipasi dilihat dari keterlibatan atau keikutsertaan aktif peserta PKH sejak dalam penetapan kebutuhan, formulasi proyek dan implementasi dalam Program Keluarga Harapan. Selain itu juga akan dilihat dalam pengambilan keputusan dalam setiap tahapan pemberdayaan.

Dalam setiap kegiatan P2K2 dalam pertemuan bulanan yang diadakan antara peserta PKH dengan pendamping, peserta PKH Kabupaten Klaten telah aktif mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari setiap pertemuan P2K2 peserta PKH tidak hanya sekedar hadir dalam pertemuan tersebut namun mereka juga turut aktif memberikan tanggapan dalam kegiatan tersebut. Dalam pertemuan P2K2 peserta PKH juga menyampaikan pertanyaan serta keluh kesah mengenai permasalahan yang mereka hadapi kepada pendamping.

Berkaitan dengan penilaian kebutuhan pada layanan pendidikan dan kesehatan, diketahui peserta PKH sudah muncul keberanian atau inisiatif untuk bertanya, usul dan meminta penjelasan. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu peserta PKH yang menyampaikan tentang masalah perkembangan anaknya yang di posyandu yaitu sebagai berikut:

*“Ya aktif bertanya umpamanya gini dulu anak saya tu pernah 3 bulan berturut-turut berat badan anak saya itu nggak naik naik tatap jadi kita juga harus bertanya gimana biar bisa naik, soalnya kalau 3 bulan berturut turut nggak naik itu ada masalah dalam perkembangannya, trus kemarin di sarankan untuk fisioterapi”* (Wawancara 4 Desember 2021).

Selain itu dalam kegiatan KUBE PKH peserta PKH juga berpartisipasi aktif, hal ini dapat dilihat bahwa mulai dari penentuan produk yang akan dibuat



sampai produk KUBE PKH jadi dan di pasarkan peserta dari kelompok KUBE tersebut sendiri yang mengambil keputusan dan melaksanakan proses produksi. Dalam kelompok kecil KUBE PKH terdapat kepengurusan sendiri seperti ketua, sekretaris dan bendahara yang akan mempermudah dalam mengambil sebuah keputusan dalam kelompok KUBE PKH.

**Gambar 6.**  
**Contoh Proses Pembuatan Produk KUBE PKH Oleh Ibu-Ibu Peserta PKH**



Peserta PKH memiliki partisipasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari peserta PKH yang aktif memberikan tanggapan dalam setiap pertemuan. Berkaitan dengan layanan pendidikan dan kesehatan peserta PKH juga memiliki keberanian untuk bertanya pada layanan tersebut sehingga mereka menjadi faham cara mengatasi masalah yang dihadapi. Selain itu dengan adanya KUBE PKH mereka dapat mengambil keputusan sendiri untuk memajukan usaha yang mereka miliki.

##### **5. Tingkat Kontrol Peserta Program Keluarga Harapan**

Pemberdayaan pada tingkat ini mengacu pada persamaan atau keseimbangan kontrol antara laki-laki dan perempuan terhadap faktor produksi dan distribusi keuntungan. Persamaan atau keseimbangan kontrol berarti tidak adanya dominasi oleh salah satu pihak.

Dalam penelitian ini, tingkat kontrol dilihat dari sejauh mana peserta PKH memiliki kuasa dalam mengambil keputusan, mengontrol serta kemampuan perempuan dalam menyuarakan pendapat berkaitan dengan kebutuhan mereka.

Sebagaimana pada tingkat partisipasi, diketahui bahwa meskipun sudah

muncul keberanian atau inisiatif untuk bertanya dan meminta penjelasan, namun ibu-ibu peserta PKH masih belum memiliki kekuatan atau power untuk mengubah suatu keputusan yang menyangkut dirinya.

Tingkat kontrol pada pemberdayaan terhadap peserta PKH belum terlihat hasil positif. Meskipun telah memahami pendefinisian kebutuhan pada peserta PKH namun mereka belum mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh lembaga atau pranata sosial lainnya yang sebenarnya mempengaruhi pilihan-pilihan personal dalam kehidupannya.

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program yang digagas untuk mengupayakan pemberdayaan perempuan dalam keluarga sehingga dapat mendorong kesetaraan gender. Pada PKH mensyaratkan bahwa dana bantuan diberikan kepada ibu (istri) atau perempuan dewasa. Namun berdasarkan hasil temuan menunjukkan dalam pengelolaan uang bantuan masih bergantung pada izin suami.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dilihat bahwa dalam urusan rumah tangga terutama dalam pengelolaan keuangan suami masih memegang kontrol atas istri dan keluarga. Dalam pengambilan keputusan rumah tangga, pihak perempuan memang diberikan kesempatan mengutarakan pendapat dan keinginan mereka. Namun dalam pengambilan keputusan sepenuhnya tetap diserahkan kepada pihak suami. Dalam hal ini perempuan belum memiliki kapasitas untuk menentukan keinginan mereka yang disebabkan oleh masih adanya budaya patriarki yang diterapkan oleh suami mereka yang menyebabkan pola relasi kuasa yang tidak seimbang antara suami dan istri. Jika dilihat berdasarkan kerangka pemberdayaan perempuan Longwe, pemberdayaan perempuan peserta PKH belum mencapai tingkat kontrol. Hal ini disebabkan karena peserta PKH belum mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Selain itu dalam pengelolaan uang bantuan suami masih memegang kontrol atas istrinya, hal tersebut disebabkan karena masih ada budaya patriarki yang masih ada diterapkan oleh suami. Padahal menurut Longwe sebuah program pemberdayaan akan mencapai derajat tertinggi atau berhasil melakukan pemberdayaan apabila menyentuh pada tingkat kontrol.

**Tabel 4.**

**Matrik Alat Pemberdayaan Perempuan 1: Tingkat Kesetaraan (*Level of equality*)**

	KUBE (Kelompok Usaha Bersama) PKH	P2K2 (Peningkatan kemampuan Keluarga)
Kesejahteraan	Ya	Tidak
Akses	Tidak	Ya
Kesadaran	Tidak	Ya

Partisipasi	Ya	Ya
Kontrol	Tidak	Tidak

Sedangkan pada alat pemberdayaan perempuan 2: Tingkat Pengenalan/responsivitas terhadap isu-isu perempuan, pemberdayaan program keluarga harapan dapat diklasifikasikan memiliki tingkat yang positif, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program keluarga harapan memiliki tingkat pengakuan yang tinggi terhadap masalah perempuan. Untuk menunjukkan penggunaan kerangka longwe dalam menganalisis seluruh program keluarga harapan akan dibagi kedalam dua sektor yaitu sektor pendidikan & pelatihan dan ekonomi dan industri.

Pada sektor pendidikan dan pelatihan Program Keluarga Harapan memiliki kegiatan yang bernama P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga), dalam kegiatan P2K2 tersebut memiliki tingkat yang positif hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan memberikan kepekaan bahwa terdapat diskriminasi peran di dalam rumah tangga kepada perempuan peserta PKH. Sehingga dengan adanya P2K2 muncul kesadaran peserta PKH dan suami bahwa dalam rumah tangga bukan hanya tugas seorang istri namun tugas bersama antara suami dan istri. Hal ini bisa mengurangi beban kerja perempuan yang selama ini melekat pada peran tradisional perempuan.

Pada sektor ekonomi dan industri Program Keluarga Harapan memiliki kegiatan yang bernama Kelompok usaha bersama atau yang lebih sering dikenal dengan KUBE PKH, dalam kegiatan P2K2 tersebut memiliki tingkat yang positif hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan telah mampu meningkatkan penghasilan perempuan. Sehingga dengan meningkatnya penghasilan perempuan memberikan ruang bagi perempuan untuk tidak lagi bergantung seutuhnya terhadap laki-laki. Berikut tabel Alat pemberdayaan perempuan 2: Tingkat Pengenalan/responsivitas terhadap isu-isu perempuan

**Tabel 5.**  
**Alat pemberdayaan perempuan 2: Tingkat Pengenalan/responsivitas terhadap isu-isu perempuan.**

Sektor	Proyek	Level Kesetaraan					Level Pengakuan Isu-Isu Perempuan
		Kesejahteraan	Akses	Kesadaran	Partisipasi	Kontrol	
Pendidikan dan Pelatihan	P2k2 PKH	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak	Positif



Ekonomi dan Industri	KUBE PKH	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Positif
----------------------	----------	----	-------	-------	----	-------	---------

**Penutup**

Pemberdayaan perempuan dapat diartikan sebagai upaya menumbuhkan peran dan potensi perempuan dalam semua dimensi kehidupan dalam berbagai bidang baik ekonomi, pendidikan, sosial, komunikasi, informasi dan lain sebagainya yang sama dengan laki-laki. Salah satu cara pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan sekaligus upaya yang mewadahi pemberdayaan perempuan yaitu dengan menjalankan Program Keluarga Harapan. Untuk melihat tingkat keberhasilan pemberdayaan perempuan melalui Program Keluarga Harapan digunakan teknik analisis gender Sarah Longwe, dalam kerangka pemberdayaan perempuan Sara Hlupekile Longwe terdiri dari dua alat pemberdayaan perempuan yaitu tingkat kesetaraan (*level of equality*) dan tingkat pengenalan/responsivitas terhadap isu-isu perempuan. Pada alat pemberdayaan perempuan pertama yaitu tingkat kesetaraan (*Level of equality*) terdiri dari dimensi-dimensi sebagai berikut: kesejahteraan, akses, kesadaran, partisipasi, dan kontrol. Sedangkan pada alat pemberdayaan perempuan kedua yaitu tingkat Pengenalan /responsivitas terhadap isu-isu perempuan mengidentifikasi dalam tiga tingkatan yaitu: negatif, netral dan positif. Pada alat pemberdayaan 1: yaitu tingkat kesetaraan, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun pemberdayaan perempuan pada Program Keluarga Harapan telah mampu menambah tingkat kesejahteraan, akses, penyadaran dan partisipasi namun belum dapat mencapai pada tingkat kontrol. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada tingkat kesejahteraan dengan adanya bantuan PKH yang diberikan secara rutin dapat digunakan untuk membeli kebutuhan gizi ibu dan anak, selain itu dengan adanya KUBE PKH juga menambah penghasilan perempuan dengan begitu kesejahteraan perempuan lebih meningkat.
- 2) Pada tingkat akses, PKH di Kabupaten Klaten telah meningkatkan kehadiran dan akses pada sekolah dan posyandu untuk anak peserta PKH dan bagi ibu hamil peserta PKH mendapatkan layanan kesehatan dan peningkatan gizi.
- 3) Pada tingkat penyadaran, Dengan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) setidaknya PKH telah memberikan penyadaran bahwa terdapat diskriminasi peran di dalam rumah tangga kepada perempuan dan laki-laki, seperti tentang pengasuhan anak. Ketika terdapat penyadaran untuk lebih peka terhadap perbedaan atau diskriminasi ini,

beban perempuan menjadi berkurang dengan kesadaran bahwa pekerjaan-pekerjaan domestik juga menjadi tanggung jawab laki-laki.

- 4) Pada tingkat partisipasi, Peserta PKH pun juga aktif memberikan tanggapan dalam setiap pertemuan. Selain itu berkaitan dengan layanan pendidikan dan kesehatan peserta PKH juga memiliki keberanian untuk bertanya pada layanan tersebut sehingga mereka menjadi faham cara mengatasi masalah yang dihadapi.
- 5) Pada tingkat kontrol PKH belum menyentuh upaya peningkatan kontrol, Hal ini disebabkan karena peserta PKH belum mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Selain itu dalam pengelolaan uang bantuan suami masih memegang kontrol atas istrinya.

Berdasarkan kelima dimensi tersebut dapat dilihat bahwa pemberdayaan perempuan dalam Program Keluarga Harapan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pola relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam Program Keluarga Harapan belum sepenuhnya berdaya. Keadaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah budaya patriarki yang masih mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sedangkan pada alat pemberdayaan perempuan 2: Tingkat Pengenalan/responsivitas terhadap isu-isu perempuan, pemberdayaan program keluarga harapan dapat diklasifikasikan memiliki tingkat yang positif, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program keluarga harapan memiliki tingkat pengakuan yang tinggi terhadap masalah perempuan. Hal ini dapat dilihat pada sektor pendidikan dan pelatihan Program Keluarga Harapan memiliki kegiatan yang bernama P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga), dalam kegiatan P2K2 tersebut memiliki tingkat yang positif hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan memberikan kepekaan bahwa terdapat diskriminasi peran di dalam rumah tangga kepada perempuan peserta PKH. Selain itu pada pada sektor ekonomi dan industri Program Keluarga Harapan memiliki KUBE PKH, dalam pelaksanaannya telah menambah penghasilan perempuan PKH sehingga perempuan PKH tidak bergantung sepenuhnya terhadap suami.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis mengajukan saran-saran di antaranya:

1. Dalam program keluarga harapan meningkatkan pemberdayaan perempuan untuk mengatasi masalah kemiskinan harus benar-benar menjadi arus utama dalam program ini. Maka dari itu perlu adanya pemahaman yang lebih dengan melakukan peningkatan dan pelatihan kepada para pendamping PKH tentang sensitivitas gender dengan tujuan menghilangkan budaya patriarki serta agar mampu menjelaskan dengan baik kepada peserta PKH dalam P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga).

2. Dalam pelaksanaan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) PKH sebaiknya melibatkan suami peserta PKH secara langsung agar mereka lebih paham materi tentang sensitivitas gender dengan tujuan menghilangkan budaya patriarki sehingga akan tercipta kesetaraan dan keadilan gender.
3. Selain itu KUBE PKH sebaiknya berhubungan baik dengan Lembaga Keuangan Mikro Sosial (LKMS) sehingga sinergi diantara dua lembaga ini dapat berkelanjutan dan berkembang. Hal ini diharapkan sangat membantu KUBE dalam masalah keuangan dan kemitraan terhadap pihak luar.

### Referensi

- Badan Pusat Statistik Jateng. (2020). Indeks Pembangunan Gender (IPG) diakses melalui <https://jateng.bps.go.id/indicator/40/138/1/indeks-pembangunan-gender-ippg.html>
- Badan Pusat Statistik Jateng. (2020). Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan menurut Jenis Kelamin (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) diakses melalui <https://jateng.bps.go.id/indicator/40/135/1/pengeluaran-per-kapita-yang-disesuaikan-ppp-menurut-jenis-kelamin.html>
- FokusKlaten.net. (2021). Kabupaten Mendapatkan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya diakses melalui <https://www.focusklaten.net/2021/03/wabup-klaten-berikan-penghargaan.html>
- Handayani, T. & Sugiarti. (2002). *Konsep Dan Tehnik Penelitian Gender*. Malang:UMM Press
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.
- March, C., Smyth, I., & Mukhopadhyaya, M. (1999). *A Guide to Gender Analysis Frameworks*. UK :Oxfam GB, 274 Banbury Road, Oxford OX2 7DZ.
- Pancawati G, Nurhaeni, I.D.A & Demartoto, A. (2019). Feminisasi Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia. *Jurnal Trisula* 6 (2), 606-614.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan  
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*. Bandung ; Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional